

BAB III

RUNTUHNYA DEMOKRASI DAN KEMBALINYA REZIM OTORITER

BARU

Pasca revolusi Mesir tahun 2011, dinamika politik pada masa transisi demokrasi di Mesir diwarnai berbagai konflik antara kelompok pro-pemerintahan Muhammad Mursi dengan kelompok oposisi sekuler-liberal yang didukung kalangan militer. Setelah berakhirnya rezim otoriter Mubarak, Mesir masih berada dalam kekuasaan SCAF. Hal ini mendorong Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis pada pemilu putaran kedua Juni 2012 untuk mengambil beberapa langkah kebijakan dalam mengendalikan kekuasaan militer Mesir. Berbagai upaya Presiden Mursi dalam mempertahankan legitimasi serta kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang memburuk, memicu aksi protes dari rakyat Mesir hingga peristiwa kudeta militer berhasil menggulingkan kekuasaannya pada 3 Juli 2013 (Gafur, 2014, p. 95). Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan kronologi runtuhnya demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Mursi hingga terjadi peristiwa kudeta militer di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi. Penulis juga akan membahas tentang kembalinya rezim otoriter baru di Mesir pasca kudeta yang ditandai dengan kekuasaan dominasi militer Mesir di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi.

A. Pemerintahan Demokrasi Mesir di bawah Presiden Muhammad Mursi

Kemenangan Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin dalam pemilu presiden tahun 2012 menjadi sejarah baru bagi Mesir, dimana untuk pertama kalinya presiden yang terpilih secara demokratis berasal dari kalangan sipil. Usai dilantik, Presiden Mursi kemudian menyusun beberapa kebijakan dalam negeri dan luar negeri Mesir, meliputi permasalahan politik pemerintahan, sosial ekonomi hingga kebijakan militer dan lawan politik yang lain. Langkah yang diambil Presiden Mursi terkait masalah politik pemerintahan adalah: Pertama, pada 10 Juli 2012 menghidupkan kembali parlemen dimana sebelumnya parlemen ini telah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, membentuk kabinet baru dengan melantik para menteri pada 2 Agustus 2012 yang terdiri dari 35 menteri termasuk delapan menteri negara. Ketiga, membebaskan 572 tahanan militer yang terlibat dalam revolusi Mesir 25 Januari 2011. Keempat, Presiden Mursi memilih 21 anggota penasehat yang terdiri dari 3 orang wanita dan 2 penganut Kristen pada 27 Agustus 2012. Kelima, Presiden Mursi menetapkan Dekrit Presiden dan mengadakan referendum untuk memutuskan Konstitusi Baru Mesir (Ramly & Irenewaty, 2015).

Pada bidang sosial ekonomi, kebijakan yang dirancang Presiden Mursi antara lain: Pertama, Presiden Muhammad Mursi berencana mengembangkan potensi Terusan Suez dan pariwisata Mesir yang mendukung peningkatan perekonomian rakyat. Kedua, sebagai upaya menyelamatkan perekonomian Mesir dari krisis, Presiden Mursi melakukan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 4,8 miliar dolar. Ketiga, sebagai langkah perbaikan ekonomi, Presiden Mursi

mengambil kebijakan pengurangan subsidi energi, yaitu sebanyak 22% dari total pengeluaran pemerintah pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Juni serta pengurangan anggaran belanja Negara dengan lebih memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Keempat, Presiden Mursi memberlakukan kebijakan jaminan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan tunjangan sosial bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, prajurit dan perwira angkatan bersenjata sebesar 15%. Presiden juga menaikkan jaminan sosial bagi pensiunan menjadi 300 pound dari yang sebelumnya hanya 200 pound. Kelima, Presiden Mursi menetapkan program 100 hari yang menitikberatkan pada isu-isu keamanan, pasokan energi, pangan (roti), kebersihan jalan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas di Mesir. Di sisi lain, Presiden Mursi juga mengambil kebijakan untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan terbuka untuk lawan politiknya yaitu kalangan militer, nasionalis-sekuler, liberal, Kristen Koptik dan kubu Islam lain (Ramly & Irenewaty, 2015).

Sementara itu, terkait kebijakan luar negeri, Presiden Mursi lebih menitikberatkan kerjasama dengan kawasan Timur Tengah dan Afrika, seperti Arab Saudi dan Turki. Di bawah kepemimpinan Presiden Mursi, pemerintah Mesir mulai berkontribusi dalam menyikapi konflik-konflik kawasan seperti Palestina, Suriah dan Sinai. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dimana Mesir di bawah rezim Anwar Sadat menandatangani Perjanjian Damai *Camp David* dengan Israel pada tahun 1979 yang mengakibatkan memburuknya hubungan Mesir dengan negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kali ini, pemerintahan Mursi justru memutuskan

untuk tidak lagi tunduk kepada Barat (Amerika Serikat dan Israel) seperti yang dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. (Ramly & Irenewaty, 2015).

Tantangan yang harus dihadapi Presiden Mursi pada masa transisi politik kali ini cukup berat. Pasalnya, pasca lengsernya rezim militer Hosni Mubarak, Mesir masih berada di bawah kekuasaan SCAF dimana SCAF tetap memiliki otoritas untuk memilih Dewan Konstituante baru (Lisbet, 2013). Usai pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan bahwa anggota parlemen hasil pemilu harus dibubarkan karena pencalonan beberapa anggota parlemen dipilih melalui jalur independen dan ini dianggap inkonstitusional. Meskipun demikian, keputusan parlemen terkait terpilihnya Mursi sebagai presiden dan terbentuknya 100 anggota Dewan Konstituante tetap dianggap sah dan tetap berjalan. Di sisi lain, kemenangan Mursi mendorong SCAF mengeluarkan Dekrit Presiden 17 Juni 2012 sebagai upaya SCAF untuk menguasai legislatif di pemerintahan Mesir pasca pembubaran parlemen hasil pemilu (Basyar, 2015)

Sejak dilantik menjadi Presiden Mesir pada 30 Juni 2012, Mursi menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada awal pemerintahannya, Presiden Mursi mengeluarkan Dekrit pada 8 Juli 2012 yang berisi pengaktifkan kembali anggota parlemen yang dibubarkan MK. Namun Dekrit Presiden 8 Juli ini tidak menggoyahkan keputusan MK. Parlemen tetap dibubarkan pada 17 Juli 2012. Tidak lama berselang, Presiden Mursi kembali mengeluarkan

Dekret 12 Agustus 2012 yang berisi pembatalan kekuasaan SCAF di tingkat legislatif. (Basyar, 2015, p. 32)

Posisi dan peran Militer Mesir semakin lemah, terlebih ketengangan antara Presiden Mursi dengan militer berujung pada pemecatan Kepala SCAF, Mohamed Hussein Tantawi. Hanya selang beberapa bulan, Mursi kembali mengeluarkan Dekrit 22 November 2012 yang menjadikan Mursi berkuasa hampir tanpa batas. Sikap Mursi dalam menekan kekuasaan Militer Mesir akhirnya menuai protes rakyat, terutama dari kubu liberal sekuler. Kemudian Dewan Konstituante mengambil keputusan untuk menyepakati draft konstitusi baru pada 30 November 2012 tanpa kehadiran kelompok oposisi sekuler-liberal. Meskipun draft konstitusi baru telah disetujui oleh rakyat Mesir menjadi Konstitusi Baru Mesir dalam referendum yang diadakan pemerintah pada 15 Desember, namun tidak serta merta menyurutkan gejolak aksi protes rakyat yang menentang pemerintahan Presiden Mursi. Sebagai upaya meredakan gejolak politik yang terus meningkat, Presiden Mursi berdialog dengan beberapa tokoh nasional pada 9 Desember 2012. Hasil dari dialog ini, Presiden Mursi kemudian kembali mengeluarkan Dekrit yang bertujuan mencabutan dekrit sebelumnya. (Basyar, 2015, p. 33).

Dalam konteks ekonomi, stabilitas ekonomi Mesir semakin memburuk pasca defisitnya anggaran serta kemerosotan cadangan devisa pada Juni 2013 yang mencapai US\$1,1 miliar dari bulan Mei 2013 sehingga mencapai US\$14,9 miliar. Tercatat dalam laporan Kementerian Keuangan Mesir, sejak Januari hingga Mei 2013, Mesir mengalami defisit anggaran mencapai 112,4 miliar pound Mesir dan

mengalami peningkatan mencapai 202,9 miliar pound Mesir pada akhir Mei 2013. Di sisi lain, korupsi dan nepotisme warisan rezim Hosni Mubarak, kembali tumbuh subur di Mesir. Sejak Mesir dipimpin oleh Presiden Mursi, permasalahan kemiskinan juga meningkat seiring peningkatan jumlah pengangguran yang mencapai 13 persen pada tahun 2013 dari 9 persen di tahun 2010 (Lisbet, 2013, p. 6). Langkah awal yang dijalankan Presiden Mursi dalam mengatasi krisis ekonomi di Mesir adalah melakukan pinjaman dana kepada Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund-IMF*) senilai 4,8 miliar dollar. (VOA Indonesia, 2012).

Meskipun demikian, kebijakan ekonomi dengan jalan meminjam dana kepada IMF ini justru menuai protes dari beberapa kalangan. Kubu yang kontra terhadap kebijakan pemerintah ini menilai bahwa Mesir terkenal dengan terkenal dengan sumber daya yang besar, seperti sumber daya minyak terutama gas, sumber daya pertanian, sumber pendapatan dari Terusan Suez, industri, tambang emas, dan pertambangan lainnya serta sumberdaya manusia di dalam negeri dan tenaga kerja di luar negeri. Jika Mesir meminjam dana IMF dikhawatirkan akan memperburuk krisis ekonomi dan lebih banyak menguntungkan IMF saja dikemudian hari (Ramly & Irenewaty, 2015).

Tantangan berat juga dialami pemerintahan Mesir ketika dampak dari kebijakan luar negeri Mesir untuk tidak lagi tunduk pada AS dan Israel mengakibatkan AS menarik bantuan dananya untuk Mesir. Sejak Presiden Mursi memutuskan untuk tidak melanjutkan Perjanjian Damai *Camp David* tahun 1979 antara Israel dengan Mesir, Mesir harus menanggung konsekuensi dimana AS tidak

lagi menggelontorkan bantuan dana senilai 1,5 miliar dollar tiap tahunnya seperti yang dilakukan AS kepada pemerintahan Mesir sebelumnya (Ramly & Irenewaty, 2015).

B. Kudeta Militer Mesir Tahun 2013 di bawah Komando Abdel Fattah Al Sisi

Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi, gejolak politik dan sosial ekonomi di Mesir belum juga selesai. Ditambah lagi, langkah Presiden Mursi yang terkesan otoriter, menyebabkan kepercayaan rakyat Mesir terhadap pemerintahan yang terpilih secara demokratis semakin menurun. Kegagalan Presiden Mursi dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang semakin memburuk pasca revolusi Mesir tahun 2011 serta keputusan Dekrit Presiden 22 November 2012 menjadikan Presiden Mursi mengalami krisis legitimasi. Pencabutan dekrit pada Desember 2012 rupanya tidak menyurutkan protes dari kaum oposisi yang terlanjur anti pemerintahan Mursi. Bahkan sebelum peringatan satu tahun kepemimpinan Mursi 30 Juni 2013, gerakan pemberontakan dari kelompok oposisi liberal sekuler yang melahirkan gerakan Tammarod kemudian menggulirkan petisi dan melakukan aksi unjuk rasa untuk menggulingkan Mursi (Basyar, 2015, p. 33).

Ketegangan politik antara pendukung Presiden Mursi, Ikhwanul Muslimin dengan aktivis gerakan Tammarod (Pemberontakan) yang menentang kepemimpinan pemerintahan Mursi semakin memuncak. Kedua kubu saling melakukan aksi demonstrasi hingga menyebabkan stabilitas keamanan Mesir menjadi terancam.

Hingga pada puncak peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden Mursi pada 30 Juni 2013, terjadi demonstrasi terbesar sepanjang dirinya menjabat sebagai presiden (Agastya, 2013, p. 77). Terdapat beberapa alasan mengapa kepemimpinan Mursi dinilai gagal meskipun mendapatkan suara sebanyak 52% dalam Pemilihan Presiden setahun lalu, yaitu: (Harian Tempo, 2013)

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin

Satu tahun terakhir, sebagian warga Mesir yang tidak menyukai pendukung Presiden Mursi yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin semakin menguat. Beredar kabar bahwa Presiden Mursi membagikan beberapa kekuasaan penting untuk para kader Ikhwanul Muslimin. Terakhir, Presiden Mursi menunjuk tujuh gubernur baru dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Namun pendukung Mursi menolak tuduhan ini dengan bantahan bahwa Presiden Mursi telah menawarkan posisi penting di kabinet dan lembaga negara lainnya untuk kubu oposisi namun mendapatkan penolakan.

2. Memburuknya Ekonomi

Pasca satu tahun kepemimpinan Presiden Mursi, perekonomian Mesir semakin memburuk. Pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi tonggak ekonomi Mesir mengalami penurunan dan tidak kunjung pulih. Sementara, investasi asing yang diharapkan dapat membantu menjalankan roda perekonomian juga tidak kunjung datang. Belum lagi, harga bahan pokok makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus melonjak, sehingga

listrik seringkali padam karena ketiadaan bahan bakar. Meskipun Kabinet Mursi mengajukan pinjaman dana kepada IMF sebesar US\$ 4,8 miliar, namun pinjaman ini tetap saja akan memaksa pemerintah Mesir untuk memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

3. Dekrit Presiden 22 November 2012

Keputusan Presiden Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden 22 November 2012, dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit tersebut, Mursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (*judicial review*) dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Keabsahan parlemen sebelumnya sempat digugat oleh beberapa pihak. Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya menguntungkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM

Satu tahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Presiden Mursi dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir. Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi

dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat. Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut akan mengontrol organisasi masyarakat sipil.

Melihat gejolak politik dan ekonomi yang melanda Mesir, Kepala SCAF Abdel Fattah Al Sisi akhirnya memberikan ultimatum kepada Presiden Mursi untuk menyelesaikan konflik politik dalam waktu 48 jam sejak 1 Juli 2013. Mursi tidak menyangka, Al Sisi yang telah diangkat menjadi Kepala SCAF menggantikan Mohamed Hussein Tantawi justru mengambil langkah penggulingan kekuasaan terhadap dirinya setelah ia menolak ultimatum. Tepatnya pada 3 Juli 2013 malam, SCAF di bawah komando Al Sisi menangkap Presiden Mursi dan mengambil alih kekuasaannya dengan cara paksa serta membekukan Konstitusi Mesir 2012. Tidak dipungkiri, kudeta militer yang mengakhiri kekuasaan Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis merupakan bentuk pencederaan demokratisasi di Mesir (Harian Kompas, 2013)

C. Pemerintahan Mesir di bawah Dominasi Militer Abdel Fattah Al Sisi

Pasca lengsernya kekuasaan Presiden Mursi, kalangan militer kembali menguasai pemerintahan Mesir. Di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi, dominasi

militer Mesir berusaha untuk menyingkirkan posisi kelompok Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan karena dianggap sebagai organisasi yang telah menyebabkan stabilitas politik dan keamanan di Mesir semakin terancam. Bahkan Militer Mesir melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin dengan tuduhan telah melakukan provokasi kepada rakyat Mesir untuk melawan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh SCAF Mesir (Gafur, 2014, p. 95)

Di sisi lain, Militer Mesir juga menutup beberapa stasiun televisi berita, termasuk satu yang dioperasikan oleh Ikhwanul Muslimin, Egypt25 pada 4 Juli 2013. Satu manajer stasiun TV Egypt25 ditangkap sesaat setelah Kepala SCAF, Abdul Fatah Al Sisi mengumumkan rencana untuk transisi politik yang baru. Pasukan keamanan Mesir juga menggerebek kantor saluran berita Al Jazeera Mesir. Sedikitnya lima stafnya ditahan. Selain itu, salah satu channel Al Jazeera Mubasher Misr juga dilarang mengudara. Stasiun Al Jazeera Mesir dikenal luas dengan siaran beritanya yang berani dan independen. Liputan mereka mengenai revolusi Mesir pada 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak mendapat sambutan positif. Akan tetapi belakangan ini, militer Mesir menuding Al Jazeera terlalu bersimpati kepada Ikhwanul Muslimin dan Presiden Mursi. Kantor berita negara MENA melaporkan pihak berwenang juga menutup dua stasiun yang dikelola kubu Islam lainnya, Al-Hafiz dan Al-Nas. Kedua media ini berafiliasi dengan gerakan Islam Salafi yang radikal (Tempo.co, 2013).

Di Kairo, ribuan anggota Ikhwanul Muslimin melakukan aksi demonstrasi di depan barak Pasukan Garda Republik pada 6 Juli 2013. Aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan dan tindak kekerasan oleh aparat keamanan juga terjadi di beberapa kota di wilayah selatan Mesir di sepanjang Terusan Suez dan Delta Sungai Nil, mengakibatkan sedikitnya 200 korban luka. Sementara itu, di kota El-Arish, Sinai Utara, para pendukung Ikhwanul Muslimin yang menyerang sebuah kantor pemerintahan, empat diantaranya tewas di tangan aparat keamanan. Dalam aksi demonstrasi kali ini telah menyebabkan korban tewas sedikitnya 36 orang (Hardoko, Pendukung dan Anti-Mursi Bentrok, 36 Tewas, 2013)

Sementara itu, untuk melanjutkan pemerintahan, SCAF telah menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adly Mansour sebagai presiden sementara hingga dilaksanakannya pemilu presiden selanjutnya. Pemerintahan sementara kemudian membentuk Komite-50 untuk mengamandemen konstitusi hasil referendum tahun 2012. Dalam Komite-50 ini, kelompok IM tidak memperoleh kursi satupun. Sikap pemerintah terhadap kubu oposisi IM pada akhirnya semakin menyudutkan kalangan umat Islam dalam kancah politik Mesir (Gafur, 2014, p. 95).

Pemerintahan sementara di Mesir telah dilantik pada tanggal 16 Juli 2013. Perdana Menteri Hazem El-Beblawi dan 34 anggota kabinetnya mulai melaksanakan tugas secara resmi setelah mengambil sumpah di depan Presiden sementara Adly Mansour. Pemerintahan sementara ini mengemban tugas berat yakni menyelamatkan kondisi perekonomian dalam negeri yang kian memburuk dan mengembalikan

pemerintahan sipil. Pemerintahan sementara bertugas mengelola bantuan dari negara-negara Arab senilai US\$12 miliar untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Bantuan ini diberikan karena negara-negara Arab berpendapat bahwa keamanan dan stabilitas Mesir merupakan fondasi dari keamanan Arab. Selain itu, juga mengupayakan agar administrasi lebih bersifat teknokratik agar dapat lebih memikat para investor asing untuk kembali menanamkan modal sebagaimana diusulkan oleh para pengusaha dan ekonom (Lisbet, 2013, p. 6)

Di bidang sosial politik pemerintahan sementara memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu enam bulan hingga proses pengembalian pemerintahan kepada pihak sipil. Tugas ini menjadi berat karena sebagian besar anggota kabinet pemerintahan sementara adalah para teknokrat dan kelompok liberal. Tidak terdapat satu pos pun yang diberikan kepada FJP dan Partai Annur. Padahal Pemerintahan sementara dan proses transisi politik di Mesir pasca jatuhnya Pemerintahan Presiden Mursi ini tidak akan berlangsung dengan damai jika tidak melibatkan partisipasi dari seluruh kelompok dan partai politik, mengingat Partai Kebebasan dan Keadilan (Sayap politik Ikhwanul Muslimin) dan Partai Annur merupakan partai Islam dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu lalu (Lisbet, 2013, p. 6).

Dalam perjalanan pemerintahan sementara, krisis ekonomi, politik dan keamanan di Mesir tidak kunjung usai. Belum lagi, perselisihan antara pendukung

Mantan Presiden Mursi yang dikudeta dengan Militer Mesir tidak juga menemukan titik terang. Pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus menerus melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes tindakan kudeta militer pada 3 Juli 2013. Aksi demonstrasi yang melibatkan bentrokan dengan aparat semakin mengkhawatirkan. Terlebih, Dominasi Militer Mesir di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi terus melakukan tindakan kekerasan dan penumpasan terhadap Ikhwanul Muslimin (IRIB World Service, 2014).

Hingga Agustus 2013, para pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan aksi demonstrasi menolak kudeta Mantan Presiden Mursi dengan mendirikan kamp-kamp di tempat umum di Kairo. Mereka menuntut pemerintahan sementara untuk membebaskan Muhammad Mursi. Mantan Presiden Mursi sampai saat ini masih ditahan dan dipenjarakan oleh Militer Mesir. Pemerintahan sementara Mesir telah mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu bulan. Dalam pernyataan tersebut, Presiden sementara Adly Mansour menyebutkan terkait situasi ini militer akan membantu polisi memulihkan ketertiban, melindungi berbagai fasilitas milik negara, dan melindungi warga sipil. Pengumuman melalui siaran televisi nasional dikeluarkan ketika aksi protes dan bentrok makin meluas (BBC Indonesia, 2014).

Aksi demonstrasi ini kemudian memuncak pada 14 Agustus 2013, setelah dipicu oleh tindakan aparat keamanan membubarkan secara paksa aksi protes IM di

dua kamp dengan menggunakan kendaraan lapis baja, bulldoser dan helikopter. Dalam aksi demonstrasi kali ini telah mengakibatkan sedikitnya 900 korban jiwa termasuk 100 tentara dan polisi. Tiga jurnalis mancanegara juga turut menjadi korban tewas saat melaksanakan tugas reportase di Mesir. Pasca terjadinya bentrokan dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi para pendukung Mursi yang sebelumnya diikuti oleh puluhan ribu orang menunjukkan tanda-tanda menurun. Beberapa pihak menilai kekuatan organisasi tersebut telah menurun akibat penangkapan sejumlah pemimpinnya oleh pihak militer. (Marboen, 2013).

Pasca terjadinya bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dengan militer dan aparat keamanan Mesir yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, pemerintahan sementara Mesir kemudian merealisasikan usulan Dewan Hakim yang meminta agar kelompok Ikhwanul Muslimin dibubarkan. Sebuah laporan yang diturunkan oleh harian Al-Akhbar pada Jumat ini menyebut, pemerintah akan segera membubarkan kelompok pendukung mantan Presiden Muhammed Mursi itu. Laman Al Arabiya, pada Jumat 6 September 2013, melansir kebenaran informasi itu dari Juru Bicara Menteri Solidaritas Sosial, Hany Mahana. Pemerintah menganggap Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang tidak memiliki status yang jelas. Meskipun pada akhirnya IM telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pada Maret 2013, namun pemerintah tetap menganggap bahwa gerakan kelompok IM dapat mengancam stabilitas keamanan Mesir dimana kelompok tersebut telah membentuk sebuah gerakan militer yang melakukan aktivitas ilegal dan

harus dibubarkan. Gerakan radikal Islam yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hassan al-Banna ini juga pernah dibubarkan secara resmi oleh Pemerintahan Mesir pada tahun 1954 (Mahaputra & Dewi, 2013).

Sebagai upaya meredam gejolak aksi demonstrasi, pemerintahan sementara Mesir meratifikasi Undang-undang (UU) Demonstrasi pada akhir November 2013. Peraturan UU Demonstrasi ini semakin memperketat gerakan aksi demonstrasi. Melalui UU Demonstrasi, wajib bagi penyelenggara demonstrasi untuk menyampaikan pemberitahuan aksi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis tiga hari sebelum aksi protes dilangsungkan. UU Demonstrasi yang semakin memperluas sepak terjang aparat keamanan dalam menindak kelompok garis keras ini kemudian menuai protes dari rakyat terutama gerakan pemuda dan sekuler. Namun, aksi protes kecil ini dapat segera dibubarkan polisi. Di sisi lain, pemberontakan militan juga terjadi di perbatasan Israel, di Sinai pasca penggulingan Muhammad Mursi. Militan garis keras yang memiliki pangkalan di kawasan Gurun Sinai meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan. Mereka terkadang bekerja sama dengan penyelundup lokal badui dan pejuang Palestina dari Gaza. Hampir setiap hari kelompok militan ini menyerang pos-pos pemeriksaan keamanan. Dari sumber yang didapatkan militer, terdapat sekitar 1.000 militan bersenjata di Sinai yang sebagian besar adalah orang-orang suku Badui. Mereka terpecah ke dalam sejumlah kelompok dengan ideologi berbeda atau loyalitas suku dan sulit untuk melacak keberadaan mereka di daerah gurun itu. (Wibisono, 2013)

Sebulan setelah pemberlakuan UU Demonstrasi, pemerintahan sementara Mesir menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada 25 Desember 2013. Terkait hal ini, semua aktivitas, pendanaan dan keanggotaan dalam kelompok IM adalah sebuah kejahatan. Pengumuman ini merupakan puncak ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang telah menggelar demonstrasi hampir setiap hari sejak kudeta militer 3 Juli 2013. Pemerintah menyatakan, keputusan ini diambil menanggapi pemboman fatal pada 24 Desember 2013 di Markas Besar Polisi di kota Delta Nil. Dalam aksi peledakan bom ini menewaskan 16 orang dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami cedera. Meskipun Ikhwanul Muslimin membantah tuduhan atas serangan di Mansoura itu tetapi pemerintah tetap bersikeras menyatakan IM sebagai organisasi teroris. Sementara itu, gerakan Tamarrod yang telah mengatur kampanye petisi pemicu penggulingan Mursi pada Juli 2013, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintahan sementara Mesir (Auliani, 2013)

Menyusul pernyataan pemerintah sementara Mesir yang menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, Polisi Rahasia Mesir juga menangkap 20 wartawan yang dituduh bekerjasama dan memihak Ikhwanul Muslimin. Sebanyak 16 wartawan Mesir dan 4 wartawan asing ditangkap dan dipenjarakan dengan beberapa tuduhan, antara lain: Pertama, melakukan pertemuan illegal dengan kelompok IM. Kedua, membantu organisasi teroris IM dengan memberi informasi, memasok peralatan dan uang, serta mempromosikan kelompok IM dengan

menyiarkan kegiatan organisasinya. Ketiga, menyiarkan berita palsu (pembohongan publik) yang membahayakan kepentingan nasional dan keamanan publik. Keempat, menyebarkan desas desus untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Mesir mengalami perang saudara. Kelima, menggunakan hotel bintang lima Marriot, tempat mereka tinggal sebagai pusat penyiaran berita Al Jazeera (Muhaimin, 2013)

Tindakan represif pemerintahan sementara Mesir di bawah dominasi militer Al Sisi ini semakin menuai protes dari Ikhwanul Muslimin. Selama berbulan-bulan, Ikhwanul Muslimin dan Koalisi Nasional untuk Legitimasi Mesir memimpin pembangkangan sipil. Mereka meyakini bahwa militer sedang berusaha membangun sebuah pemerintahan otoriter seperti pemerintahan di masa rezim Hosni Mubarak dengan cara merampas suara rakyat. Ketegangan antara pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin semakin memuncak menyusul pengadilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin. Vonis hukuman mati ini telah menyulut protes di kalangan internal Mesir dan bahkan kecaman dari masyarakat internasional. PBB menyatakan kekhawatiran atas keputusan pengadilan Mesir tersebut dan menuntut pemerintah sementara Mesir untuk tetap berkomitmen dengan peraturan Hak Asasi Manusia internasional (IRIB World Service, 2014)..

Sejumlah aktivis yang tergabung kelompok revolusioner Mesir pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, yaitu Gerakan Pemuda 6 April turut mengecam keras tindakan militer terhadap Ikhwanul Muslimin. Mereka juga menegaskan untuk

melanjutkan protes terhadap pemerintahan sementara. Saat ini Abdel Fatah Al Sisi dianggap sebagai ikon yang mengembalikan pemerintahan militer yang otoriter. Oleh sebab itu, Ikhwanul Muslimin yang juga didukung Gerakan Pemuda 6 April berencana memboikot pemilu presiden mendatang. Mereka menuntut rakyat Mesir untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei 2014, seperti halnya pemboikotan referendum draft konstitusi baru pada Januari 2014 . (IRIB World Service, 2014).

Sementara itu, draft konstitusi 2014 yang telah disusun oleh Komite-50, telah mendapatkan persetujuan dari rakyat Mesir dalam referendum yang diselenggarakan pada 14-15 Januari 2014. Persentase suara yang setuju sangat tinggi yaitu 98,1% (19.985.389 suara). Akan tetapi, apabila angka itu dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar yaitu 53.423.485 orang, maka suara yang setuju kurang dari 50%. Sementara itu, suara pemilih yang sah hanya 20.613 67dalam7 (38,6%) dari total daftar pemilih. Sedangkan yang tidak sah ada 246.947 suara. Dari seluruh suara yang sah, yang memilih *yes (na'am)* adalah 19.985.389 (98,1%) dan yang tidak setuju (*la*) adalah 381.341 (1,9%) (Basyar, 2015, p. 42)

Selanjutnya, pada pemilu presiden yang digelar pada Mei 2014 hanya diikuti oleh dua kandidat. Pada bulan Mei 2014, Pemimpin kudeta militer tahun 2013, Abdel Fattah Al Sisi mengajukan diri sebagai kandidat presiden. Dalam pemilu presiden yang digelar pada 26-27 Mei 2014, Al Sisi mendapatkan kemenangan mutlak dan

mengalahkan lawan politiknya Hamdeen Sabahi yang merupakan tokoh kelompok *Nasseris*. Al Sisi memperoleh 96,93% pemilih dari suara pemilih sah sedangkan Sabahi hanya memperoleh 03,07% . Dengan kemenangan Al Sisi pada pemilu kali ini menjadikan Mesir kembali dipimpin oleh kalangan militer, setelah selama satu tahun dipimpin oleh Presiden Mursi dari kalangan sipil (Basyar, 2015, p. 3). Rezim militer Mesir yang sempat jatuh pasca Revolusi Mesir tahun 2011, kini kembali bangkit dan semakin menandakan runtuhnya sistem demokrasi pasca kudeta militer. Pada bab IV, penulis akan membahas karakteristik pemerintah otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi kudeta militer tahun 2013.